fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
ejournalwiraraja.com
Vol 20, nomor 1, Juni 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

Optimalisasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Akuntansi Publik pada UMKM Batik di Kelurahan Bendogerit

Oleh :
Ulva Roifatul Lailin [1)], Wydha Mustika Maharani[2)], Brian Pristianto[3)]
[1,2,3]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Balitar
E-mail: doramexminorii@gmail.com[1)] wydhamustika7@gmail.com[2)]**

Abstract

This study aims to examine how the principles of good governance can be optimally implemented in the management of public accounting in the batik industry in Bendogerit Village. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation from batik business owners, village officials, and relevant stakeholders. Financial management practices, from production to marketing, were analyzed to identify the extent to which principles such as transparency, accountability, participation, efficiency and effectiveness have been applied. The results showed that most business actors still use manual records and have not implemented a conventional accounting system, so the application of Good Governance principles has not been running optimally. This research recommends an optimization strategy that includes training, counseling, and cross-sector collaboration between the village government, batik MSMEs, and universities to build a simple, participatory, and community-based public accounting system. The findings not only describe the current state of financial governance, but also provide practical solutions to strengthen the accountability and professionalism of MSMEs in the local creative industry.
Keywords: good governance, public accounting, batik MSMEs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip *Good Governance* dapat diimplementasikan secara optimal dalam pengelolaan akuntansi publik pada industri batik di Kelurahan Bendogerit. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi dari pelaku usaha batik, perangkat kelurahan, serta pemangku kepentingan terkait. Analisis dilakukan terhadap praktik pengelolaan keuangan, mulai dari produksi hingga pemasaran, untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas telah diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan pencatatan manual dan belum menerapkan sistem akuntansi konvensional, sehingga penerapan prinsip *Good Governance* belum berjalan secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan strategi optimalisasi yang mencakup pelatihan, penyuluhan, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah kelurahan, UMKM batik, dan perguruan tinggi guna membangun sistem akuntansi publik yang sederhana, partisipatif, dan berbasis komunitas. Temuan ini tidak hanya menggambarkan kondisi tata kelola keuangan saat ini, tetapi juga memberikan solusi praktis untuk memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme UMKM dalam industri kreatif lokal.
Kata Kunci: *good governance*, akuntansi publik, UMKM Batik

Vol 20, nomor 1, Juni 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa terdapat sekitar 65,5 juta UMKM di Indonesia, dan sektor ini menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto nasional (Rp9.580 triliun) serta menyerap 97% tenaga kerja (Deny, 2024). Kontribusi ini menggambarkan besarnya peran UMKM sebagai penggerak perekonomian dan penyerap lapangan kerja di Indonesia.

Industri batik sebagai bagian dari UMKM bahkan disebut menjadi sektor unggulan dan sarat nilai budaya. Kementerian Perindustrian mencatat industri batik telah menyerap 200.000 tenaga kerja dari 47.000 unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia (Catriana & Sukmana, 2021). Sektor batik nasional terdiri atas ribuan unit usaha (sekitar 5.946 unit industri batik di seluruh provinsi) yang secara signifikan menopang ekonomi kreatif dan ekspor, sehingga memberikan konteks penting bagi penelitian mengenai tata kelola *(good governance)* dan akuntansi publik dalam pengelolaan keuangan usaha batik.

Di tingkat kebijakan, pemerintah Indonesia gencar mendorong digitalisasi UMKM dan penerapan tata kelola yang baik. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM bergabung dalam ekosistem digital pada tahun 2024 (Suhayati, 2023), sejalan dengan program nasional seperti UMKM Go Online dan Pahlawan Digital UMKM. Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa pemanfaatan infrastruktur TIK yang masif harus memberikan manfaat bagi UMKM, terutama karena UMKM menjadi penyumbang sekitar 60% dari PDB nasional (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022).

Upaya pemetaan potensi digital dan tata kelola ini mencerminkan urgensi pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM melalui penggunaan teknologi dan prinsip-prinsip *good governance*. Manfaat digitalisasi akuntansi bagi UMKM telah banyak dikemukakan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi usaha. Digitalisasi pencatatan keuangan memungkinkan pelaku UMKM melakukan pencatatan transaksi secara real-time, memeriksa kondisi keuangan kapan pun, dan memudahkan pengawasan usaha (Taufiq & Purwono, 2023).

Digitalisasi akuntansi juga

Vol 20, nomor 1, Juni 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

diketahui membantu mengurangi kesalahan pembukuan akibat human error, mempercepat akses data akurat, serta meningkatkan akurasi laporan keuangan. Dengan pencatatan yang lebih akurat dan terdiferensiasi, UMKM dapat memisahkan dana usaha dari dana pribadi, sehingga masalah umum seperti pembukuan campur-aduk dapat diatasi (Taufiq & Purwono, 2023). Namun, keberhasilan digitalisasi akuntansi memerlukan literasi digital yang memadai dan dukungan infrastruktur bagi pelaku UMKM, yang menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan UMKM di era digital.

Di sisi lain, prinsip-prinsip *good governance* perlu diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan dan kinerja UMKM. Menurut panduan KNKG, prinsip-prinsip good governance untuk UMKM meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (Parianti et al., 2023). Penerapan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan usaha dapat meningkatkan tata kelola dan keberlanjutan usaha. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pertanggungjawaban memberi kesempatan bagi pengusaha untuk mengetahui dengan jelas sumber-sumber dana dan penggunaan keuangan usaha (Iqbal et. al, 2024). Dengan akuntabilitas yang baik, laporan keuangan menjadi lebih dapat diandalkan sehingga memudahkan pengambilan keputusan strategis.

Kelurahan Bendogerit, yang terletak di Kota Blitar, dikenal sebagai daerah wisata sejarah berkat keberadaan Makam Bung Karno. Industri batik di kawasan ini memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal, dengan banyak produsen yang menghasilkan batik dengan corak khas daerah. Namun, meskipun sektor ini memiliki potensi besar, banyak pengusaha batik yang masih mengelola keuangan secara tradisional dan menghadapi kesulitan dalam transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Dengan demikian, lokasi penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat mengoptimalkan pengelolaan akuntansi publik di industri batik, mendukung keberlanjutan usaha, dan memperkuat posisi UMKM dalam rantai nilai industri batik.

Meskipun banyak literatur menekankan pentingnya digitalisasi dan *good governance*, terdapat kekurangan kajian yang spesifik mengkaji gabungan

Vol 20, nomor 1, Juni 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

kedua aspek tersebut dalam konteks usaha batik. Sebagian besar studi selama ini berfokus pada skala usaha lebih besar atau sektor yang berbeda, sehingga belum memadai menggambarkan kondisi unik UMKM batik di daerah tertentu. Di tingkat lokal seperti di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar, di mana usaha batik berkembang secara klaster, diperlukan pemahaman khusus tentang hambatan dan peluang penerapan good governance dan akuntansi digital. Gap pengetahuan ini menandakan perlunya penelitian yang mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip tata kelola dan teknologi akuntansi digital diimplementasikan oleh UMKM batik, serta sejauh mana hal tersebut mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan usaha mereka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan akuntansi publik (termasuk akuntansi keuangan usaha) pada industri batik UMKM di Bendogerit. Penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang menghambat maupun memfasilitasi adopsi praktek akuntansi digital dan tata kelola usaha yang baik di kalangan pelaku UMKM batik. Secara khusus, penelitian akan mengkaji bagaimana penerapan teknologi akuntansi digital dan mekanisme *good governance* dapat diintegrasikan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan performa usaha batik setempat. Tujuan lainnya adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan dan strategi bagi pelaku usaha serta pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola dan sistem keuangan UMKM batik melalui pendekatan digital.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur mengenai hubungan antara *good governance*, digitalisasi akuntansi, dan kinerja UMKM dalam industri kreatif. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang bagaimana praktik digital dan prinsip tata kelola mendukung keberhasilan UMKM, khususnya dalam konteks perusahaan mikro. Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman serta rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan (seperti dinas terkait dan pemerintah kota) dan pelaku usaha batik. Pemerintah daerah dan pihak pembina UMKM dapat menggunakan temuan ini untuk merancang program pendampingan yang lebih tepat sasaran. Sementara bagi pelaku UMKM batik

Vol 20, nomor 1, Juni 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

Bendogerit, penelitian ini diharapkan menyoroti manfaat penerapan akuntansi digital dan tata kelola yang baik, sehingga mereka dapat meningkatkan efisiensi operasional, memenuhi standar pelaporan keuangan, serta memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha di pasar lokal maupun global.

2. TINJAUAN TEORITIS

Prinsip *Good Governance*

Good Governance adalah konsep tata kelola yang berorientasi pada keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum dalam manajemen publik. Menurut Kurniawan (2022), prinsip-prinsip ini adalah pondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Yusuf dan Rahmawati (2022) juga menekankan bahwa penerapan *Good Governance* dalam tata kelola industri kreatif penting untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam era globalisasi dan digitalisasi.

Akuntansi Publik Berbasis Komunitas

Akuntansi publik berbasis komunitas merupakan pendekatan pencatatan dan pelaporan keuangan yang menyesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan komunitas lokal, terutama bagi UMKM. Nugraha (2021) menjelaskan bahwa model akuntansi komunitas memberikan solusi praktis bagi UMKM yang sering mengalami kesulitan dalam mengadopsi sistem akuntansi konvensional yang kompleks. Fitriyah (2024) menambahkan bahwa penerapan akuntansi sederhana yang transparan merupakan kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik dan peluang UMKM mengakses sumber daya eksternal.

Keterkaitan *Good Governance* dengan Akuntansi Publik UMKM

Studi oleh Permana dan Widodo (2021) mengungkapkan bahwa prinsip *Good Governance*, terutama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan yang baik dalam konteks UMKM. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, UMKM dapat menciptakan laporan keuangan yang lebih akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga didukung oleh Sari dan Nugroho (2023) yang menemukan bahwa transformasi digital dalam pencatatan akuntansi secara signifikan meningkatkan tata kelola keuangan UMKM.

Vol 20, nomor 1, Juni 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

Model Kolaboratif dalam Peningkatan Kapasitas UMKM

Lailin et al. (2025) menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah lokal, perguruan tinggi, dan komunitas bisnis merupakan metode efektif dalam mengoptimalkan tata kelola akuntansi publik di tingkat lokal. Perguruan tinggi memainkan peran penting dalam memberikan pelatihan dan pendampingan teknis, sementara pemerintah menyediakan regulasi dan dukungan kebijakan. Pendekatan ini membantu UMKM mengadopsi prinsip *Good Governance* secara berkelanjutan dalam praktik sehari-hari mereka.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam dan kontekstual penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan akuntansi publik di industri batik lokal Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial kompleks yang tidak dapat dijangkau oleh metode kuantitatif (Creswell, 2014). Lokasi penelitian dipilih secara purposif mengingat potensinya sebagai pusat ekonomi kreatif berbasis budaya lokal serta relevansi permasalahan tata kelola keuangan publik di wilayah tersebut.

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria berikut: (1) pelaku usaha batik (pemilik UMKM, pengrajin, karyawan) dengan pengalaman minimal tiga tahun dalam pengelolaan usaha, (2) aparat kelurahan yang bertugas dalam pengembangan ekonomi lokal dan UMKM, serta (3) akademisi atau pendamping UMKM yang memiliki pengalaman intervensi atau pendampingan tata kelola keuangan UMKM.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam menggunakan panduan semi-terstruktur, observasi langsung dengan pedoman observasi berupa checklist kegiatan pengelolaan keuangan, serta dokumentasi berupa laporan keuangan UMKM, proposal kegiatan, kebijakan pemerintah, dan arsip surat-menyurat terkait. Seluruh data wawancara direkam dengan izin informan, kemudian ditranskrip secara detail untuk analisis lanjutan.

Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari tiga tahap utama yaitu: (1) kondensasi data *(data condensation)*, yakni proses memilih, menyederhanakan, mengelompokkan, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari lapangan

Vol 20, nomor 1, Juni 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

sesuai dengan tujuan penelitian, (2) penyajian data *(data display),* di mana data disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan interpretasi, serta (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi *(conclusion drawing/verification),* yang merupakan proses menyimpulkan pola-pola temuan terkait penerapan prinsip Good Governance untuk menentukan strategi optimalisasi yang relevan.

Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan (pelaku usaha batik, aparat kelurahan, dan akademisi/pendamping UMKM). Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan. Prosedur member-checking diterapkan dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi kepada informan untuk memastikan akurasi dan kredibilitas data yang dikumpulkan.

Interpretasi hasil penelitian dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya lokal, termasuk budaya kerja komunitas, hubungan sosial antara pelaku usaha dengan aparat kelurahan, serta norma lokal yang mempengaruhi keputusan keuangan. Dengan pendekatan yang sistematis ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan strategi optimalisasi tata kelola akuntansi publik sesuai karakteristik lokal berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance.*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kelurahan di Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, adalah Bendogerit. Kelurahan ini memiliki nilai historis tinggi karena berada di kawasan wisata nasional Makam Bung Karno. Kawasan ini menjadi pusat industri kreatif, terutama batik lokal. Batik adalah produk utama, dan sebagian besar penduduk bergantung pada usaha mikro dan kecil. Meskipun demikian, metode pengelolaan usaha, terutama pengelolaan keuangan, masih digunakan secara konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri batik di Kelurahan Bendogerit menggunakan prinsip *Good Governance* dan mengelola keuangan walau belum semuanya. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha batik Bendogerit masih mengelola keuangan secara manual. Pencatatan dilakukan hanya dengan buku tulis atau bahkan hanya dengan ingatan. Tidak ada pelaporan keuangan yang teratur, dan tidak ada sistem akuntansi konvensional yang digunakan. Hal ini menyebabkan

Vol 20, nomor 1, Juni 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

kesulitan mendapatkan bantuan modal dan program pemerintah yang membutuhkan administrasi keuangan yang lengkap. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan akuntansi publik di industri batik masih sangat terbatas.

Studi ini menunjukkan bahwa industri batik belum menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* secara keseluruhan dalam pengelolaan akuntansi publik. Karena laporan keuangan tidak tersedia untuk pihak luar atau anggota kelompok usaha, transparansi tidak efektif. Selain itu, tidak ada cara untuk mengevaluasi bagaimana dana perusahaan digunakan, sehingga tidak ada akuntabilitas. Partisipasi terbatas pada kelompok kecil bisnis. Karena tidak ada metode sistematis untuk mengukur kinerja bisnis, efisiensi dan efektivitas tidak optimal. Karena pelaku usaha tidak memahami regulasi keuangan publik dan standar akuntansi UMKM, supremasi hukum belum terinternalisasi. Faktor pendukung yang ditemukan meliputi: (1) kesadaran pelaku usaha akan pentingnya pencatatan keuangan yang baik, (2) dukungan dari kelurahan, dan (3) dekat dengan perguruan tinggi. Di sisi lain, faktor penghambat termasuk: (1) pelaku usaha tidak tahu banyak tentang akuntansi, (2) pemerintah belum memiliki sistem pelatihan reguler, dan (3) mereka tidak memiliki akses yang cukup ke teknologi dan alat bantu pencatatan.

Penelitian ini mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan penerapan *Good Governance* melalui (1) pelatihan akuntansi publik berbasis komunitas, (2) penggunaan aplikasi pencatatan keuangan sederhana berbasis Android, (3) pembentukan tim pendamping lokal dari perguruan tinggi dan kelurahan, dan (4) meningkatkan peran kelurahan sebagai fasilitator kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri batik Bendogerit belum menerapkan prinsip *Good Governance* secara keseluruahn dalam pengelolaan akuntansi publik. Namun, optimalisasi memiliki potensi besar jika dilakukan dengan cara yang tepat. Studi ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik mencakup perubahan budaya dalam manajemen usaha selain prosedur administrasi. Sistem akuntansi publik yang akuntabel dan transparan dapat dibangun di tingkat lokal dengan dukungan lintas sektor dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Penelitian ini dinyatakan berhasil karena studi ini menunjukkan bahwa perubahan budaya dalam manajemen usaha adalah bagian dari tata kelola yang baik, selain prosedur administrasi. Dengan dukungan lintas

Vol 20, nomor 1, Juni 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

sektor dan peningkatan kapasitas pelaku usaha, sistem akuntansi publik yang akuntabel dan transparan dapat dibangun di tingkat lokal. Studi ini dianggap berhasil karena: (1) menemukan keadaan sebenarnya dari pengelolaan keuangan di industri batik Bendogerit, (2) menilai seberapa efektif prinsip *Good Governance* diterapkan, (3) menciptakan strategi optimalisasi yang relevan dan praktis, dan (4) memberikan kontribusi akademik dan praktis untuk pengembangan tata kelola akuntansi publik di sektor ekonomi kreatif.

Selain itu, sebagian besar pemilik usaha batik Bendogerit telah menunjukkan kemajuan besar dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* secara berkelanjutan berkat pelatihan dan penyuluhan yang diberikan seperti pengusaha batik Sawunggaling dan dan batik Sendang Lestari. Ini ditunjukkan oleh pencatatan keuangan yang lebih jelas, pelaporan bisnis yang konsisten, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan kelompok. Pemilik usaha juga memperkuat aspek akuntabilitas kepada mitra bisnis dan pelanggan dengan menerapkan sistem pengawasan internal sederhana. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa intervensi dan pendampingan edukasi dapat menciptakan tata kelola usaha yang lebih baik dan berkelanjutan di sektor ekonomi kreatif lokal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik usaha batik Bendogerit telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* secara berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan yang direncanakan. Ada banyak bukti keberhasilan ini:

1) Aspek Sosial: Pelaku usaha semakin menyadari pentingnya transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Anggota kelompok usaha menjadi lebih terbuka dan bekerja sama, yang ditandai dengan diskusi kelompok yang sering, partisipasi aktif dalam forum pelatihan, dan semangat saling mendukung dalam pengelolaan bisnis. Kolaborasi antara pebisnis dan masyarakat sekitar juga meningkat, terutama dalam promosi dan distribusi batik.
2) Aspek Ekonomi: Perbaikan manajemen keuangan telah didorong oleh penerapan prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Ini berdampak pada pertumbuhan dan stabilitas bisnis. Pelaku bisnis mulai dapat membuat laporan keuangan sederhana, mencatat jumlah uang yang masuk, dan mengawasi pengeluaran secara lebih sistematis. Hal ini membantu mereka membuat keputusan bisnis yang lebih logis dan strategis, dan juga membuka

Vol 20, nomor 1, Juni 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

pintu untuk peluang pembiayaan atau kerja sama dengan pihak eksternal. Karena kepercayaan konsumen yang semakin meningkat terhadap tata kelola bisnis mereka, beberapa usaha bahkan mencatat peningkatan pendapatan.

3) Aspek Kelembagaan: Banyak UMKM atau pelaku usaha mulai menggunakan struktur organisasi yang lebih sederhana dan membangun mekanisme pengawasan internal yang berbasis pada kewajiban kolektif. SOP *(Standard Operating Procedures)* mulai dibuat untuk aktivitas produksi dan distribusi. Sementara itu, posisi dan tanggung jawab anggota kelompok menjadi lebih jelas. Selain itu, hubungan antara pemerintah lokal dan kelompok usaha batik menjadi lebih kuat, terutama dalam hal pendampingan dan akses ke program pemberdayaan.

Metode pelatihan dan penyuluhan ini terbukti berhasil dalam menanamkan prinsip-prinsip *Good Governance* secara kontekstual dan praktis. Ini tidak hanya membantu bisnis batik Bendogerit, tetapi juga menjadi model untuk tata kelola ekonomi kreatif berbasis komunitas di tingkat lokal.

5. PENUTUP

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan akuntansi publik di UMKM batik Kelurahan Bendogerit masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pencatatan keuangan belum sesuai standar. Sebagian besar bisnis masih menggunakan sistem manual, sehingga mereka tidak menyadari betapa pentingnya memiliki laporan keuangan yang rapi dan transparan. Selain itu, masih kurangnya upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas. Tidak ada kepercayaan dan kohesi sosial dalam komunitas usaha batik karena kelemahan tersebut. Program peningkatan kapasitas pemerintah dan lembaga pendukung lainnya belum berhasil karena hal tersebut.

Namun, peluang untuk membuat strategi optimalisasi muncul ketika masalah ini ditemukan. Untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam menerapkan prinsip *Good Governance* dan pengelolaan akuntansi publik yang lebih baik, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan sangat penting. Untuk membangun sistem akuntansi publik berbasis komunitas, kolaborasi lintas sektor, seperti antara pemerintah kelurahan, perusahaan kecil dan menengah, dan perguruan tinggi,

Vol 20, nomor 1, Juni 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

sangat penting. Pelaku bisnis akan lebih mudah mengadopsi perubahan jika mereka memiliki sistem yang sederhana namun efektif.

Akibatnya, diperlukan komitmen bersama dan rencana yang mencakup aspek teknis dan kultural untuk membuat pengelolaan bisnis batik di Kelurahan Bendogerit lebih transparan, terlibat, dan profesional. Metode pelatihan dan penyuluhan ini terbukti berhasil dalam menanamkan nilai-nilai *Good Governance* secara kontekstual dan praktis. Ini tidak hanya membantu perusahaan batik Bendogerit, juga menjadi model untuk tata kelola ekonomi kreatif lokal yang berbasis komunitas. Para pelaku usaha batik telah secara bertahap menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. Mereka telah menunjukkan keterbukaan dalam pencatatan keuangan, tanggung jawab dalam pengelolaan usaha, penggunaan sumber daya yang efisien, dan keterlibatan masyarakat, terutama perempuan, dalam proses produksi.

Pemerintah daerah harus segera menyusun strategi edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM batik mengenai tata kelola keuangan berbasis *Good Governance*. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui workshop dan pelatihan interaktif yang memadukan teori dan praktik dengan penggunaan teknologi, seperti aplikasi akuntansi berbasis cloud. Teknologi ini tidak hanya mempermudah pencatatan transaksi secara efisien, tetapi juga meningkatkan transparansi dan mempermudah audit. Untuk mendukung adopsi teknologi ini, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta sangat diperlukan agar pelaku usaha mendapatkan akses ke platform yang sesuai dengan kapasitas mereka.

Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan implementasi, perlu dibentuk sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Pemerintah kelurahan, bersama Perguruan Tinggi dan sektor swasta, dapat bekerja sama untuk memberikan *feedback* secara berkala tentang perkembangan UMKM batik dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Melalui evaluasi dan pembinaan rutin, pelaku UMKM batik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat daya saing serta kemampuan mereka untuk mengakses pembiayaan yang lebih baik dan program pendampingan yang sesuai. Dengan cara ini, keberlanjutan industri dan UMKM batik di Kelurahan Bendogerit dapat terjaga dan bahkan berkembang lebih pesat.

Vol 20, nomor 1, Juni 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

DAFTAR PUSTAKA

Biondi, L., & Bracci, E. (2018). Sustainability, popular and integrated reporting in the public sector: A fad and fashion perspective. Sustainability, 10(9), 3112. https://doi.org/10.3390/su10093112

BPS Kota Blitar. (2023). Profil UMKM Kota Blitar 2022. Blitar: BPS.

Catriana, E., & Sukmana, Y. (2021, Oktober 6). Menperin: Industri batik sudah menyerap 200.000 tenaga kerja. Kompas. https://money.kompas.com/read/2021/10/06/152635526/menperin-industri-batik-sudah-menyerap-200000-tenaga-kerja

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Deny, S. (2024, Agustus 6). Kontribusi UMKM ke PDB Indonesia tembus Rp 9.580 triliun. Liputan6.com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5665709/kontribusi-umkm-ke-pdb-indonesia-tembus-rp-9580-triliun

Dunn, W. N. (2000). Pengantar analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fennell, S., Kaur, P., Jhunjhunwala, A., Narayanan, D., Loyola, C., Bedi, J., & Singh, Y. (2018). Examining linkages between smart villages and smart cities: Learning from rural youth accessing the internet in India. Telecommunications Policy, 42(10), 810–823. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2018.06.002

Fitriyah, H. (2024). Akuntansi untuk UMKM: Panduan praktis. Surabaya: Literasi Nusantara.

Iqbal, M., Ningsih, N. A., Siregar, R. H., & Astri, Y. (2024). Analisis pengaruh prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada UMKM di Kota Medan. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2(1), 226–235. https://doi.org/10.61722/jiem.v2i1.691

Jatmikowati, S. H. (2021). A study of public policy implementation in e-administration services. Academy of Strategic Management Journal, 20(Special Issue 2), 1–23. https://www.abacademies.org/articles/a-study-of-public-policy-implementation-in-eadministration-services-11065.html

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022, Mei 31). Perkuat UMKM adopsi teknologi digital, Menkominfo tekankan dukungan regulasi [Siaran Pers]. https://indonesia.go.id/kategori/siaran-pers-g20/6298/siaran-pers-perkuat-umkm-adopsi-teknologi-digital-menkominfo-tekankan-dukungan-regulasi

Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Vol 20, nomor 1, Juni 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

(2023). Pedoman peningkatan kapasitas akuntansi UMKM. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan SDM.

Kurniawan, T. (2022). Good governance dan manajemen keuangan publik. Jakarta: Rajawali Pers.

Lailin, U. R. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi kolaboratif dalam program pemerintah daerah (Program RT Keren) di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar. Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media, 12(2), 1–6. https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/translitera/article/view/3361

Lailin, U. R., Haryanti, N., & Ardiansyah, R. S. (2024). Peran administrasi publik dan komunikasi publik dalam membangun kolaborasi antara kelompok masyarakat (Pokmas Mulya Abadi) dan pemerintah guna pembangunan kelurahan. Public Service and Governance Journal, 5(2), 215–232. https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1634

Lailin, U. R., Kusumawijayanti, A. R., Harumike, Y. D. N., & Saadah, D. L. (2023). Use of Instagram social media as Blitar City government branding program (RT Keren case study program, Bendogerit Village). International Journal of Science, Technology & Management, 4(6), 1713–1717. https://ijstm.inarah.co.id/index.php/ijstm/article/view/1012

Lailin, U. R., Mei, P. C., & Puswandari, R. D. (2025). Prinsip good governance guna pengelolaan akuntansi publik dan pengawasan pada kelompok masyarakat di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar. Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 2(1), 51–70. https://doi.org/10.35457/transgenera.v2i1.4124

Lailin, U. R., Nuryanuarifa, D., & Maharani, W. M. (2024). Implementasi kebijakan pemberian bantuan biaya pendidikan (Studi pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 149 Tahun 2022). Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa, 2(2), 37–48. https://doi.org/10.59581/jmpb-widyakarya.v2i2.3296

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Nugraha, D. (2021). Model akuntansi komunitas: Alternatif untuk UMKM. Bandung: Mitra Wacana Media.

Parianti, Y., Sahrir, S., & Syamsuddin, S. (2023). Pengaruh penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja karyawan. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 7(3), 93–105. Suhayati, M. (2023). Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. PUSAKA: Info Singkat DPR RI XV(24), 16–21.

Permana, R., & Widodo, S. (2021). Penerapan prinsip good governance dalam penguatan kelembagaan UMKM. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 8(2), 98–110.

Sajida, S., Husna, L. T., Rahayu, K. W., & Suryawati, I. A. (2023). Evaluating public website performance: Content analyses on Malang City Government website. Journal of Governance, 8(2), 263–278. https://doi.org/10.31506/jog.v8i2.19248

Vol 20, nomor 1, Juni 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

Sari, A., & Nugroho, M. (2023). Transformasi digital dalam akuntansi UMKM: Studi kasus di Jawa Timur. Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Daerah, 12(1), 55–68.

Taufiq, N. F., & Purwono, J. (2023, Desember 22). Pentingnya digitalisasi akuntansi bagi UMKM. Republika. https://www.republika.id/posts/49099/pentingnya-digitalisasi-akuntansi-bagi-umkm

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yusuf, M., & Rahmawati, I. (2022). Analisis implementasi good governance dalam tata kelola industri kreatif. Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia, 6(3), 102–115